

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan kondisi Kabupaten Rembang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional.

#### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut.

##### 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

###### 1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Rembang tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- a. Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
- b. Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;
- c. Perlunya penguatan keluarga di dalam penerapan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme.

###### 2. Kesehatan

Disamping pendidikan, pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- a. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular;
- c. Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- d. Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- e. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
- f. Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput bola”.

###### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

###### a. Prasarana Jalan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk

menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rembang terus dilaksanakan, namun masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten Rembang yang dalam kondisi tidak baik, antara lain disebabkan:

- 1) Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (*tonase*) terutama jalur wilayah penambangan di kecamatan Sale, Sedan dan Gunem. Kerusakan jalan terutama terjadi pada jalur jalan kewenangan propinsi Lasem – Jatirogo terutama di sekitar kecamatan Sedan dan Sale serta jalur jalan kewenangan kabupaten di Kecamatan Sale, Sedan dan Gunem.
- 2) Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa hutan maka banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa / kecamatan yang berada di lahan hutan sehingga pembangunannya harus melalui prosedur kerjasama.
- 3) Banyak jalan kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
- 5) Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.

*b. Prasarana Sumber Daya Air*

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pengairan lahan pertanian dan air industri. Seiring pertumbuhan penduduk dan kompleksitas aktivitas masyarakat akan semakin meningkatkan kebutuhan air, beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan sumber daya air sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak;
- 2) Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- 3) Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- 4) Keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tampungan air di wilayah tengah hingga hilir di Kabupaten Rembang.

*c. Air Minum dan Sanitasi*

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu :

- 1) Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum;
- 2) Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan SPAM di wilayahnya;
- 3) Sulitnya merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terkait pelayanan sanitasi;
- 4) Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi standar kelayakan;
- 5) Keterbatasan lahan yang tersedia untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik setempat di desa/ kelurahan maupun terpusat di kecamatan / kabupaten.

- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses pelayanan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d. *Penataan Ruang*

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang yaitu : kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada penyediaan RTH perkotaan, pengelolaan dan pelestarian kawasan dengan fungsi lindung, pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan percepatan perwujudan kawasan industri sebagai salah satu kawasan strategis provinsi.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Permasalahan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Masih ada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang terutama di wilayah pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan pantai yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai;
- 2) Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah / kekurangan rumah (backlog);
- 3) Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
- 4) Penataan dan pengembangan kawasan permukiman tradisional belum dilakukan secara optimal salah satunya di kawasan Kota Lasem;
- 5) Kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Guna meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Rembang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan.

Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana merupakan salah satu indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum Indonesia berada di kawasan rawan bencana dalam garis cicin api (*ring of fire*) dan berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa bumi. Begitu pula di Kabupaten Rembang yang teridentifikasi adanya Patahan Lasem sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu banyak bencana lain yang terjadi meliputi tanah longsor, abrasi, angin putting beliung dan banjir.

Tantangan dan permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu perhatian adalah

- 1) Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;

- 2) Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
- 3) Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

## 6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rembang senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- b. Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
- c. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;

### 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- c. Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja.

#### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang;

#### 3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);

#### 4. Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
- b. Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat. Salah satunya pembangunan embung, pembangunan sarana prasarana permukiman, pasar hewan dan reaktifasi kereta api.
- c. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

#### 5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- a. Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- b. Kurang optimalnya pengelolaan / pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar.
- c. Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik.
- d. Penanganan konservasi lahan kritis belum optimal sehingga kualitas sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan air.
- e. Masih rendahnya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedia.
- f. Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik.

#### 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
- b. Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

#### 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber daya keuangan;
- b. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi



dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;

- c. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.

#### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### **9. Perhubungan**

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum optimalnya fungsi terminal;
- b. Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional masih perlu diminimalisir;
- c. Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi;
- d. Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi salah satunya adalah Pelabuhan Rembang serta belum terpenuhinya kelengkapan jalan di jalan kewenangan pusat dan provinsi;
- e. Belum terkoneksi dan terintegrasinya moda angkutan penumpang terutama dalam menyambut reaktifasi kereta api yang diperkirakan sebagian besar akan memanfaatkan lahan baru.

#### **10. Komunikasi dan Informatika**

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- a. Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e-Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
- b. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.

#### **11. Koperasi dan UKM**

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
- b. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM.

#### **12. Penanaman Modal**

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- b. Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Rembang.

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Rembang, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- b. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
- c. Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

### 14. Statistik

Penyediaan data dan informasi yang reliable, up to date, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

### 15. Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

### 16. Kebudayaan

Nilai-nilai budaya Kabupaten Rembang merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

### 17. Perpustakaan

Guna mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Rembang, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakaan, dan tenaga keperpustakaan.

### 18. Kearsipan

Salah satu pendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Rembang, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai.

#### **4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

##### **1. Kelautan dan Perikanan**

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan;
- c. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap akibat adanya regulasi pemerintah yang sulit diterapkan di daerah.

##### **2. Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a. Belum optimalnya pengembangan DTW;
- b. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

##### **3. Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi off-farm upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. Rendahnya curah hujan di kabupaten Rembang mengakibatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang;
- b. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;
- c. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;

##### **4. Perdagangan**

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu: rendahnya daya saing pasar, serta sarana prasarana pusat perdagangan;



## 5. Industri

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- b. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

## 6. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

### 4.1.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, unpredictable dan unbounderless menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

- a. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- b. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- c. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah.

#### 2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain: belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

#### 3. Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

4. Pengawasan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

4.1.5. Fungsi lain

Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1. Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
- 2. Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP;
- 3. Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.2 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Rembang yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang”. Masalah utama tersebut dirumuskan menjadi 5 (lima) masalah pembangunan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- 1. Tingginya Angka Kemiskinan;
- 2. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan;
- 3. Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- 4. Kurangnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
- 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Untuk lebih memahami secara mendalam maka keterkaitan antar permasalahan utama tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 4.1



Gambar 4.1  
Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan  
Kabupaten Rembang

Berikut penjabaran permasalahan utama pembangunan Kabupaten Rembang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Rembang:

4.2.1 **Tingginya Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga secara mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan rilis BPS, Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Kabupaten Rembang dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 18,35%, Jumlah penduduk miskin sebanyak 115.190 jiwa. Capaian tersebut turun 0,19% bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 18,54% dengan jumlah penduduk miskin 115,490 jiwa. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang menempati posisi ke lima terbawah setelah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga. Posisi ini juga tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (Kab. Pati, Kudus, Jepara, Blora dan Grobogan). Capaian angka kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 18,35% masih dibawah dari target RPJMD Kabupaten Rembang sebesar 16,11%. Angka Garis kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar Rp. 354.440,- lebih tinggi dari Provinsi Kabupaten Rembang.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan tingginya angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Permasalahan: Tingginya Angka Kemiskinan**

Permasalahan	Akar Masalah
1. Kualitas & kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja dan rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat	Kurangnya fasilitas dan pelayanan kebutuhan pelatihan dan tenaga kerja
	Kurangnya keterampilan dan kemampuan wirausaha masyarakat
2. Belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan dalam penanganan PMKS
	Belum optimalnya layanan perlindungan, penanganan PMKS
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap peluang kerja	Kurangnya kemampuan dan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin
4. Belum optimalnya perkembangan lembaga ekonomi desa	Kurangnya fasilitasi terhadap layanan lembaga ekonomi desa
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi desa

4.2.2 **Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa

penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang yang belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat yang diperoleh masih sebatas Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan Daerah lebih baik. Apabila pemerintah bisa mencapai predikat WTP berarti good dan clean government dapat terwujud. Oleh karena itu pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.2.**  
**Rumusan Permasalahan: Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Permasalahan	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
	Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
	Belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
3. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan
	Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman

**4.2.3 Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian**

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan

masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan di Kabupaten Rembang adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan Kabupaten dalam menarik investasi untuk meningkatkan struktur perekonomian.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kabupaten Rembang dan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang di tahun 2017 sebesar 6,18%, angka ini lebih tinggi dari LPE tahun 2016 yaitu sebesar 5,23%. Angka ini lebih tinggi dari LPE Provinsi Kabupaten Rembang (5,27%) dan Nasional (5,07%). Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.

**Rumusan Permasalahan : Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan**

Permasalahan	Akar Masalah
(1) Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor potensial perekonomian daerah	Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor potensial perekonomian daerah
(2) Belum optimalnya penanganan kemudahan berinvestasi	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan iklim investasi
(3) Belum optimalnya Kontribusi kategori pada sektor perdagangan dan jasa	Distribusi produk belum efektif dan efisien
	Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi lokal
	Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
	Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar
(4) Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif	Belum tertatanya Industri ekonomi kreatif

**4.2.4 Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.



Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Rembang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan infrastruktur menjadi permasalahan di Kabupaten Rembang.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rembang adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten pada tahun 2019. Kabupaten Rembang memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencapai target Nasional 0% kawasan kumuh.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan Infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**  
**Rumusan Permasalahan : Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar**

Permasalahan	Akar Masalah
1. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan tata ruang	Belum optimalnya penerapan tata ruang di masyarakat.
2. Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas	Ketersediaan lahan untuk instalasi sanitasi komunal di kawasan pesisir Kabupaten Rembang sangat sulit didapatkan.
	Masih terdapat kondisi lingkungan permukiman yang masih buruk terutama di kawasan pesisir.
	Masih banyak rumah masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan.
	Kurangnya kualitas dan kuantitas air baku untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
	Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan akibat minimnya lahan yang tersedia.
	Masih perlunya pengoptimalan upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah
3. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal	Masih terjadi pencemaran air dan udara
	Penanganan hutan dan lahan kritis belum optimal
4. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis	Masih perlunya pengoptimalan Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan
	Perlunya peningkatan standar jalan sesuai dengan kelas jalan terutama jalan kolektor dan jalan lokal di kawasan pertambangan

Permasalahan	Akar Masalah
	Masih perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum masal Masih adanya pengusaha yang tidak mengindahkan tonase sehingga perlu dibangun jembatan timbang terutama di kawasan pertambangan serta penindakan pengusaha secara tegas Masih perlunya penambahan dan pengoptimalan Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi

4.2.5 Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Rembang berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya.

Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan tersebut terangkum dalam sebuah indikator impact yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Rembang mencapai nilai 68,95. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kabupaten Rembang yang sebesar 70,52.

Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,32; (2) Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) sebesar 12,04 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling) sebesar 6,94 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) yang sebesar Rp. 9.736,- (ribu rupiah per tahun). Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5.  
Rumusan Permasalahan : Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	Rendahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya kualitas sarana prasarana pendidikan
	Belum meratanya akses layanan pendidikan

2. Rendahnya keberdayaan gender serta perlindungan anak	Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
3. Rendahnya tingkat derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pergerakan peran serta masyarakat dalam budaya hidup sehat
	Rendahnya standar kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis

4.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

4.3.1 Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Global

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Sebagai kabupaten yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Rembang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/MDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. Millenium Development Goals (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia

pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap

keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Rembang, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

#### **b. Ancaman krisis ekonomi global**

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Rembang yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.

#### **c. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)**

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

#### **d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat**

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan



komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

## 2. *Lingkungan Nasional*

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang juga harus memperhatikan lingkungan strategis nasional selama lima tahun kedepan, antara lain:

- a. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.
- b. Kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Rembang. Kebijakan tersebut yaitu pembangunan infrastruktur strategis berupa rencana penghidupan kembali jalur perkeretaapian lintas Pantura Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur strategis ini memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang.
- c. Bonus demografi, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (*saving*) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud.

Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.6.**  
**Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah**

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2014-2019)	Isu Daerah (RPJPD 2005-2025)
<div>1. Kemiskinan</div> <div>2. Pangan dan Gizi</div> <div>3. Kesehatan</div> <div>4. Pendidikan</div> <div>5. Gender</div> <div>6. Air bersih dan sanitasi</div> <div>7. Energi</div> <div>8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja</div> <div>9. Infrastruktur</div> <div>10. Kesenjangan</div> <div>11. Kota dan Permukiman</div> <div>12. Produksi &amp; konsumsi berkelanjutan</div> <div>13. Perubahan iklim</div> <div>14. Sumberdaya kelautan</div> <div>15. Ekosistem daratan</div> <div>16. Masyarakat inklusif &amp; damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan</div> <div>17. Kemitraan global</div>	<div>1. Stabilitas politik dan keamanan</div> <div>2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien</div> <div>3. Pemberantasan korupsi</div> <div>4. Pertumbuhan ekonomi</div> <div>5. Percepatan pemerataan dan keadilan</div> <div>6. Keberlanjutan pembangunan</div> <div>7. Peningkatan kualitas SDM</div> <div>8. Kesenjangan antar wilayah</div> <div>9. Percepatan pembangunan kelautan</div>	<div>1. Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya kualitas SDM</div> <div>2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam</div> <div>3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai</div> <div>4. Rendahnya minat investasi</div> <div>5. Globalisasi dan Perdagangan Bebas</div> <div>6. Krisis Energi</div> <div>7. Degradasi Lingkungan</div>

**3. Hasil Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021**

Skenario rekomendasi penyempurnaan KLHS merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Rembang, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016–2021.

Secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD sebagai berikut :

1. BAB I : menambahkan dasar dan uraian korelasi antara KLHS dan SDGs. (Halaman 6)
2. BAB II : menambahkan data kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator *Outcome*/Program dan Indikator Renstra.
3. BAB III : menambahkan analisis *share* Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat kemandirian daerah.

Terkait dengan analisis tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: (1) Evaluasi kualitas *spending* dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (*budget tagging*) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat, (2) Evaluasi secara menyeluruh berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD yang selama ini dilakukan oleh OPD yang terkait dan (3) mencari sumber pendanaan lain.

4. BAB IV : melengkapi isu strategis dari hasil KLHS.
5. BAB V, VI, VII dan VIII :

a. Bab V : indikator yang sifatnya makro daerah dan Bab VI, VII : indikator yang sifatnya outcome program.

- b. Indikator SDGs selain point 5.a maka akan dimasukkan dalam Renstra.

#### 4.3.2 Isu Strategis Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kabupaten Rembang, perbandingan dengan Kabupaten sekitar, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rembang, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode pembangunan perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis Kabupaten Rembang pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 sebagai berikut:

##### 1. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kabupaten Rembang mengingat terdapat 15,41% penduduk Kabupaten Rembang yang terkategori miskin pada tahun 2018. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial, yang akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

##### 2. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Rembang. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada sisi perencanaan pembangunan daerah, implementasi proses perencanaan tahunan dan 5 tahunan belum berjalan optimal, termasuk ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan.

##### 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Rembang yang didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor industri

pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

Isu Strategis Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah akan dijawab melalui Misi II RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah Kabupaten Rembang, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kabupaten Rembang yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kabupaten Rembang. Munculnya kawasan wisata bahari, wisata religi, dan wisata alam semakin diakui oleh masyarakat Rembang dan sekitarnya. Tumbuhnya hotel berbintang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Rembang. Potensi creative tourism ini patut untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah. Isu Strategis berkaitan dengan Ekonomi Kreatif, Iklim Usaha, dan Pariwisata sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- a. Peningkatan Investasi daerah;
  - b. Peningkatan Kinerja ekonomi kreatif
  - c. Peningkatan Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.
4. **Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar**

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah diperlukan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah. Instrument utama yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah tersebut adalah tata ruang. Tata Ruang sebagai matra ruang pembangunan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Pembangunan daerah yang berpedoman pada rencana tata ruang akan mewujudkan keseimbangan ruang sekaligus mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Tata ruang sendiri menyangkut dua muatan utama yaitu struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang mengatur alokasi peruntukan ruang untuk menyeimbangkan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sedangkan struktur ruang mengatur mengenai simpul simpul kegiatan wilayah yang memacu perkembangan ekonomi serta jaringan-jaringan penghubung antar simpul. Yang perlu diperhatikan di Kabupaten Rembang adalah implementasi dari peraturan tata ruang. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang banyak menimbulkan dampak lingkungan misalnya terjadinya pencemaran air dan udara serta terjadinya banjir.

Sementara itu untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas simpul-simpul yang di Kabupaten Rembang membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai. Capaian infrastruktur jalan kewenangan kabupaten yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 67,9 % pada tahun 2018. Untuk semakin menggairahkan perekonomian di Kabupaten Rembang perlu peningkatan dan penambahan infrastruktur jalan. Selain itu untuk memperlancar arus barang dan orang di Kabupaten Rembang juga perlu ditingkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama terkait dengan penyediaan angkutan masal intermoda yang terkoneksi dengan kabupaten sekitar. Hal ini selaras dengan akan dilakukannya reaktivasi jalur kereta api Rembang-Pati-Kudus-Semarang.

Permasalahan utama yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur prasarana dasar di Kabupaten Rembang adalah penyediaan air baku. Penyediaan baku merupakan kunci dari terwujudnya amanah Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak. Akses air minum di Kabupaten Rembang sudah mencapai 84,9 % pada tahun 2018 namun secara kuantitas yang memenuhi standar layak baru sebagian kecil. Minimnya debit air baku serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diiringi dengan reklamasi menyebabkan penurunan debit air baku di Kabupaten Rembang. Perlu mengoptimalkan potensi air baku di Kabupaten Rembang dengan pembangunan-pembangunan embung dan penampung air permukaan lainnya dalam skala besar.

Sementara itu peningkatan akses sanitasi dan pemenuhan ruang terbuka hijau sebagai salah satu jalan peningkatan infrastruktur permukiman terhambat penyediaan lahan. Kondisi sanitasi di wilayah pesisir Kabupaten Rembang sangat memprihatinkan namun lahan yang tersedia untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah secara komunal terhambat akibat tidak tersedianya lahan. Masyarakat juga sulit untuk merubah perilakunya yang tidak hygiene. Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai area rekreatif masyarakat sekaligus resapan air masyarakat juga terhambat ketersediaan lahan.

Isu strategis yang berkaitan dengan pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar antara lain:

- a. Pengembangan jaringan jalan sesuai dengan standar kelas jalan
- b. Penataan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Rembang, Lasem, Kragan dan Pamotan
- c. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman
- d. Pengembangan sarana dan prasarana kelengkapan keselamatan lalu lintas jalan
- e. Pengembangan jaringan prasarana perkereta-apian sesuai dengan kewenangan.
- f. Pembangunan embung dan penampungan air permukaan
- g. Pengembangan ruang terbuka hijau terutama di kawasan perkotaan Rembang dan Lasem

#### 5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem



pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi.

Pendidikan sebagai modal pembangunan jangka panjang bagi pembangunan suatu daerah. Tingkat pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni 9 (sembilan) tahun, tercermin dari lamanya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Rembang yakni 6,94 tahun (2017). Masih lemahnya ekosistem pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan lain di bidang pendidikan antara lain rendahnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, keteterjangkauan pelayanan pendidikan, belum optimalnya kualitas pendidikan dan belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta PAUD.

Isu Strategis berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- c. Peningkatan keberdayaan gender dan perlindungan anak

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.